GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas | **Tgl/Bln/Thn : 3/2/2005**

Subyek : | **Hari : Kamis**

Kata Kunci : | **Halaman : 10**

KLH Janji Peduli Kepentingan Warga

Jakarta, Kompas - Kementerian Lingkungan Hidup menjamin pelaksanaan rehabilitasi lingkungan pascabencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara tetap memerhatikan kehidupan warga yang harus kembali dari titik nol. Konsep rehabilitasi ramah lingkungan dijanjikan mengakomodasi kepentingan warga. Demikian diungkapkan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (2/2). Sebagai contoh mengakomodasi harapan warga, relokasi warga tetap dipertimbangkan agar tidak mengubah kehidupan mereka sehari-hari. "Kami mengupayakan desain ramah lingkungan sesuai harkat hidup masyarakat. Nelayan, misalnya, tetap dapat melaut," kata dia.

Desain awal yang disusun KLH adalah menghutankan pesisir pantai dengan tanaman mangrove berketebalan ratusan meter. Setelah itu, membuat gundukan lahan untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya ombak besar. Di sela-sela mangrove dan gundukan lahan tersebut, akan dibuat jalan yang menghubungkan daratan ke pantai. Rachmat mengungkapkan, masyarakat nelayan tetap dimungkinkan tinggal di kawasan pesisir sehingga dapat melaut seperti biasa. "Ini semua masih dalam desain," kata dia. Persoalannya, sesuai dengan kajian tim KLH yang turun ke lapangan beberapa hari setelah bencana, tingkat kerusakan lingkungan di pesisir pantai tergolong parah sehingga perlu mengubah ekosistem dalam skala tertentu. Ini memerlukan waktu untuk menatanya.

Zona kerusakan

KLH membagi kerusakan kawasan dalam tiga zona. Zona merah (0-2 kilometer dari pantai) tergolong rusak total, zona kuning (2-3 km dari pantai, tergantung ketinggian) yang memiliki tingkat kerusakan sedang hingga berat akibat tsunami dan arus balik, serta zona hijau ($> 3 km dari garis pantai) dengan kerusakan ringan. Terdapat lokasi-lokasi tertentu yang masih berkondisi baik. "Relokasi tidak berarti memindahkan jauh dari asalnya. Yang penting, jangan sampai hal itu menghilangkan kebiasaan hidup warga di suatu wilayah," ujar Rachmat. Pada poin pembahasan mengenai pembangunan kembali lingkungan bencana, Komisi VII DPR menyatakan dukungannya. Terutama kaitannya rencana relokasi warga yang tetap memerhatikan harkat hidupnya. "Persoalannya, sejauh mana KLH punya suara dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh," kata salah satu anggota komisi, Ichwan Ishak. Pernyataan tersebut disambut beberapa anggota komisi karena dikhawatirkan seluruh konsep yang dipaparkan tidak terwujud akibat ketidakterlibatan KLH dalam tim rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dibentuk pemerintah. "Jangan-jangan nantinya diserahkan ke kontraktor swasta yang menghilangkan semua rencana KLH ini," kata salah satu anggota. Menjawab hal itu, Rachmat mengatakan bahwa dirinya akan berusaha dilibatkan dalam tim rehabilitasi. "Saya maunya KLH dilibatkan penuh, tetapi semua kan tergantung presiden juga," kata dia.

Dampak lingkungan

Berdasarkan kajian tim KLH, gambaran awal dampak lingkungan meliputi pencemaran air permukaan dan air tanah, pencemaran limbah padat, pencemaran udara, kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove, kerusakan lahan pertanian (termasuk hutan dan ekosistem daratan), kehilangan potensi lahan khususnya di garis pantai, serta kontaminasi limbah rumah sakit, depot Pertamina, dan pabrik semen Andalas Indonesia. Di Banda Aceh, sekitar 1.300 industri kecil dan menengah juga hancur, yang sedikit banyak menimbulkan limbah yang butuh penanganan khusus. Salah satu gambaran perubahan lingkungan terlihat di Lhok Nga, Aceh Besar. Daratan yang sebelumnya berupa tanah nonpasir, yang ditumbuhi pepohonan cemara besar, pascabencana menimbulkan tumpukan pasir laut hingga ketebalan 30 sentimeter. Belum lagi puing-puing bangunan rumah yang hancur total. Berdasarkan analisis badan donor melalui Lembaga PBB untuk Program Lingkungan (UNEP), nilai kerugian akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan pascabencana di NAD dan Sumut diperkirakan mencapai 476,2 juta dollar AS. Perkiraan kerugian itu belum termasuk hitungan yang ditimbulkan pencemaran udara dan kontaminasi industri.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP